

MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Tahun XIV, Nomor 2, April 2001

ISSN 0216-2407

**Asal-Mula Orang Jawa :
Suatu Tinjauan Antropologis**
Josef Glinka

**Pengaruh Sosialisasi Gender
pada Perempuan Kelas Menengah terhadap Kesadaran Politik**
Dwi Windyastuti

Konsolidasi Demokrasi
Kris Nugroho

**Hegemoni dan Reproduksi Kekuasaan
dalam Perdagangan Perempuan (*Trafficking*) untuk Prostitusi**
Yayan Sakti Suryandaru

**Makna Realitas Sosial Iklan Televisi
dalam Masyarakat Kapitalistik**
Burhan Bungin

Lingkaran Krisis Ekonomi Indonesia
Lilik Salamah

**Resensi Buku
Mengurai Pertikaian Etnis : Migrasi Swakarsa Etnis Madura
ke Kalimantan Barat**
Doddy S Singgih

MASYARAKAT, KEBUDAYAAN DAN POLITIK diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga sebagai terbitan berkala empat bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum yang efektif bagi komunikasi belajar mengajar.

Pemimpin Umum
Sri Sanituti Hariadi

Penanggungjawab
I Basis Susilo

Dewan Redaksi
Soetandyo Wignjosoebroto
A Ramlan Surbakti
Hotman M Siahaan
Dede Oetomo

Pemimpin Redaksi
Wahyudi Purnomo

Sekretaris Redaksi
Hariono

Redaksi Pelaksana
Priyatmoko
T Sumarnonugroho
Sutinah
Yusuf Ernawan

Produksi dan Marketing
Wisnu Pramutanto
Suyono

STT No 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981
ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi
FISIP Unair
Jl Airlangga 4-6
Surabaya 60286,
Indonesia
Tilpon 031-5034015
Fax 031-5022492
e-mail: mkp@sby.centrin.net.id

Ketentuan Minimal untuk Penulis

1. Tulisan orisinal dan belum pernah di media penerbitan lain.
2. Tulisan spasi rangkap pada kertas kuwarto yang diketik dengan Microsoft Word (MS) atau Word Star (WS).
3. Menyerahkan *printout* dan *copy* disketnya
4. Judul dibuat jelas, ringkas dan padat.
5. Isi tulisan mempunyai relevansi kuat dengan kebutuhan belajar-mengajar di lingkungan ilmu-ilmu sosial.
6. Isi tulisan berkaitan erat atau disesuaikan dengan bidang keilmuan yang selama ini dikuasai penulis.
7. Memperhatikan objektivitas substansi dan kaidah-kaidah umum keilmiah.
8. Pertanggungjawaban isi ada pada penulis.
9. Penulis mengirimkan riwayat hidupnya.
10. Menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris secara benar dan baik dengan alur dan struktur kalimat yang jelas dan benar.
11. Kutipan ditulis secara *running notes*. Kutipan dan kepastakaan disusun menurut contoh berikut.

Kutipan:

..... (Kennedy, 1993:145-9).

Daftar Kepustakaan:

Kennedy, Paul, *Preparing for the Twenty-First Century* (London: Harper Collin Publisher, 1993).

McEachern, Dough, "Clash Analysis," in Andrew Parkin et al., (eds.), *Government, Politics, Power and Policy in Australia*, 5th ed. (Melbourne: Longman Cheshire, 1994).

12. Redaksi mengembalikan tulisan kepada penulis bila tulisannya dipandang belum layak muat dan memerlukan revisi.
13. Redaksi berwenang mengedit sebuah tulisan tanpa merubah isi dan pokok pikiran penulisnya.

PENGANTAR REDAKSI

Edisi Tahun XIV, Nomor 2, April 2001 berisi enam artikel dan satu resensi buku. Enam artikel membahas bidang kajian antropologi ragawi, gender, komunikasi, ekonomi dan politik. Tulisan mengenai kajian antropologi ragawi ditulis Josef Glinka, persoalan gender ditulis oleh Dwi Windyastuti dan Yayan Sakti Suryandaru, bidang ilmu komunikasi ditulis oleh Burhan Bungin, bidang kajian ekonomi dilakukan oleh Lilik Salamah, dan bidang ilmu politik ditulis oleh Kris Nugroho, bidang ilmu . Sementara itu, resensi buku dilakukan oleh Doddy S Singgih. Mereka ini merupakan sebagian tulisan yang telah masuk pada meja redaksi dan dapat dianggap layak untuk dimuat dalam edisi ini.

Dalam edisi ini kami menyertakan asal perguruan tinggi dan latarbelakang pendidikan para penulis di bawah nama penulis, agar sidang pembaca dapat mengetahui secara segera siapa penulis makalah yang sedang atau akan dibaca. Kami menyadari bahwa informasi mengenai latar belakang penulis tidak dituliskan selengkap sebelumnya.

Dalam edisi ini, kami berupaya tetap mempertahankan keberadaan "Indeks Penulis dan Tulisan *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* sejak Edisi 1999". Kami berharap sidang pembaca dapat mengetahui tulisan-tulisan apa saja yang sudah pernah dimuat di jurnal ini. Apabila diantara sidang pembaca memerlukan hasil-hasil tulisan yang pernah dimuat sebelum edisi ini, dapat menghubungi kami di alamat, tilpon atau e-mail seperti yang telah tertera dalam rubrik ini.

Sekali lagi kami mohon maaf bila masih terdapat beberapa kelemahan teknis seperti pemotongan kata yang terkesan dipaksakan untuk mengejar kerapian kolom. Di samping itu, ketika kami banyak mendapatkan kiriman artikel, sebenarnya kami ingin sekali dapat memuat seluruhnya, akan tetapi kami terpaksa menyeleksi sesuai syarat yang ada dan keterbatasan ruang dalam jurnal ini.

Sampai saat ini kami selalu mengharapkan masukan dari pembaca mengenai tulisan-tulisan yang telah dimuat dalam edisi ini. Masukan-masukan dapat berupa artikel ilmiah, kritik atau tanggapan ilmiah berupa artikel terhadap hasil pemikiran-pemikiran yang telah diajukan oleh penulis-penulis sebelumnya, dan resensi buku. Seperti edisi ini dan edisi-edisi sebelumnya, jurnal ini menerima juga tulisan-tulisan berbahasa Inggris.

Kami selalu berharap, jurnal *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* ini bisa menjadi salah satu media bagi para ilmiwan ilmu-ilmu sosial dalam rangka menciptakan suatu komunitas belajar yang kreatif dan produktif (*a productive and creative learning community*) di tengah-tengah masyarakat luas.

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	iii
Daftar Isi	iv
Asal-Mula Orang Jawa: Suatu Tinjauan Antropologis Josef Glinka	1
Pengaruh Sosialisasi Gender pada Perempuan Kelas Menengah terhadap Kesadaran Politik Dwi Windyastuti	9
Konsolidasi Demokrasi Kris Nugroho	25
Hegemoni dan Reproduksi Kekuasaan dalam Perdagangan Perempuan (Trafficking) untuk Prostitusi Yayan Sakti Suryandaru	35
Makna Realitas Sosial Iklan Televisi dalam Masyarakat Kapitalistik Burhan Bungin	51
Lingkaran Krisis Ekonomi Indonesia Lilik Salamah	65
Resensi Buku: Mengurai Pertikaian Etnis: Migrasi Swakarsa Etnis Madura ke Kalimantan Barat Doddy S Singgih	77
Indeks Penulis dan Tulisan	81

LINGKARAN KRISIS EKONOMI INDONESIA

Lilik Salamah

Dosen FISIP Unair; lulusan Unej (S-1) dan UGM (S-2)

Abstract

This paper discusses factors that shape the Indonesian economic crises. There are internal and external factors. The internal factors are the practices of crony capitalism, the weak macroeconomic structure, the market panic, and the combination of external factors and domestic economic and financial structure. The external factors are the globalization of capitalistic economy, market fluctuation, and foreign exchange brokers.

Keywords: Indonesia, crises, economic, internal factors, external factors.

Krisis ekonomi Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 terus bergulir sampai sekarang. Berbeda dengan negara-negara ASEAN misalnya Thailand, Malaysia dan Filipina yang juga kena badai krisis, mereka relatif telah bisa mengatasinya, sementara Indonesia sampai semester pertama tahun 2001 masih "berjalan di tempat" dalam arti belum bisa keluar dari krisis ekonomi yang dihadapinya. Indikasi ini terlihat dari pertumbuhan riil GDP pertengahan tahun 1990-an sampai sebelum terjadinya krisis menunjukkan rata-rata di atas 7%, setelah krisis turun drastis yaitu -13,7% (1998), -3%(1999), dan 1% (2000); sementara laju inflasi membengkak dari 6,47% (1996) sebelum krisis menjadi 11,05% (1977), 77,6% (1998), 25% (1999), dan 15% (2000) (Tim FISIP Unair, 2000:68). Indikasi lain terlihat dari nilai kurs rupiah terhadap dolar. Sebelum krisis terjadi nilainya Rp 2.682/per dollar AS, terus berfluktuasi dan awal

semester 2001 menembus batas psikologis Rp. 11.000 (padahal APBN mematoknya Rp 7000) yang berarti nilai rupiah terdepresiasi lebih dari 300%.

Mengapa terjadi krisis ekonomi di Indonesia? Dan mengapa pemerintah Indonesia sangat sulit keluar dari krisis tersebut? Pertanyaan ini menarik karena sebelumnya para pengamat bahkan Bank Dunia sangat optimis bahwa Indonesia tidak akan terkena badai krisis sebagaimana yang terjadi di negara-negara Asia.

Faktor -faktor Penyebab Krisis

Pada awal 1997 tidak banyak pihak (termasuk di Indonesia) yang memperkirakan Indonesia termasuk salah satu negara Asia yang secara ekonomik rentan terhadap serangan para spekulan mata uang. Meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menurunnya ang-

ka kemiskinan rata-rata sejak periode 1970-an memperkuat optimisme bahwa Indonesia bakal kuat menghadapi ancaman krisis moneter yang melanda kawasan Asia tersebut. Dengan menunjuk pada indikator-indikator makro ekonomi Indonesia, Bank Dunia (1997) bahkan mengatakan bahwa perekonomian Indonesia berada di dalam kondisi siap menghadapi krisis moneter. Optimisme serupa masih diperlihatkan pemerintah Indonesia ketika pada minggu kedua Mei 1997 mata uang Thailand Baht mulai menjadi sasaran para spekulasi. Optimisme menjadi berbalik ketika Juli 1997 efek menular cepat dirasakan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Kuatnya tekanan yang diduga dilakukan oleh para spekulasi mata uang asing memaksa Bank Sentral Thailand pada 2 Juli 1997 mengam-bangkan nilai tukar Baht. Krisis negara-negara ASEAN berlanjut dengan turunnya nilai mata uang Filipina (Peso), Malaysia (Ringgit), dan Indonesia (Rupiah). Krisis moneter di Indonesia kemudian berlanjut menjadi krisis ekonomi.

Pandangan tentang penyebab krisis ekonomi di Indonesia sangat beragam. Ekonom klasik seperti Krugman melihat krisis ekonomi yang melanda Asia khususnya Indonesia disebabkan karena faktor domestik, antara lain praktek *crony capitalism* dan lemahnya struktur finansial yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi makro. Sebaliknya, ekonom Keynesian seperti Prof Kindlebeger melihat krisis itu terjadi karena sentimen pasar finansial yang menyebabkan kepanikan dan menimbulkan proses penularan pa-

da sistem ekonomi nasional. Sementara itu J. Soedradjat Djiwandono (1999:) melihat bahwa krisis yang melanda Asia khususnya Indonesia karena kombinasi kekuatan dari luar serta lemahnya struktur finansial dan ekonomi domestik.

Secara eksternal, ada tiga faktor yang berpengaruh. Pertama, globalisasi ekonomi kapitalis. Dalam konteks ini, perdagangan pada dasarnya menjelaskan berlangsungnya proses internasionalisasi mata uang sejumlah negara besar dalam skala yang amat luas yang tidak hanya menjalankan kedaulatan ekonomi nasional dan regional, melainkan menjalankan persaingan yang sangat kompetitif, di mana imperialisasi dan supremasi kekuatan ekonomi industri negara-negara besar terhadap negara kecil sangat berpengaruh. Fenomenanya, mata-uang negara pemegang kendali globalisasi ekonomi dan industri dengan sendirinya menjadi alat transaksi internasional yang sangat dominan, dan dinamikanya sangat berpengaruh pada perekonomian dunia. Kedua, fluktuasi pasar. Seiring dengan globalisasi kapitalis, uang bukan lagi sekadar instrumen transaksi melainkan sudah menjadi barang fisik seperti halnya sektor riil yang setiap saat bisa dijual-beli seperti halnya barang dan jasa. Dalam konstelasi semacam ini yang menentukan nasib nilai tukar mata uang nasional terhadap valas bukan masalah internal (kebijakan pemerintah) melainkan ditentukan oleh pasar (*Jawa Pos*, 1997). Ketiga, peran spekulasi. Sesuai hukum ekonomi, semakin banyak permintaan akan menaikkan nila

harga jual. Sebelum terjadinya krisis moneter di Asia, para spekulan mengetahui bahwa banyak negara di Asia punya hutang luar negeri jangka pendek yang akan jatuh tempo. Para spekulan berusaha mengambil untung dengan nilai jual tinggi atas kurs dolar yang sedang dibutuhkan mereka. Spekulan memborongnya sehingga dollar AS menjadi langka dan nilai uang domestik menjadi terjungkal. Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad (1998:2) mengatakan kebangkrutan negara-negara Asia secara tiba-tiba dan bersama-sama bukanlah karena pemerintah yang buruk, korupsi, *crony capitalism*, dan nepotisme, tetapi karena ulah spekulan yang mencari untung sehingga terjadi devaluasi mata uang dan negara-negara Asia itu tidak dapat membayar utang.

Kejatuhan nilai rupiah sebenarnya tidak lepas dari faktor psikologis, yaitu krisis kepercayaan pasar. Ketika nilai Rupiah jatuh, pemerintah melalui Bank Indonesia telah melakukan intervensi pasar antara lain menjual dollar yang kemudian diikuti spot pasar. Kebijakan ini sampai minggu ketiga Juli telah menghabiskan dana 1,5 miliar dollar AS. Tetapi rupiah tidak bisa stabil, akhirnya pemerintah tanggal 14 Agustus 1997 melepaskan kurs rupiah. Pelepasan kurs ini didukung kebijakan pengetatan moneter melalui peningkatan suku bunga dan sterilisasi, tetapi kebijakan ini juga tidak berhasil. Berbagai usaha perbaikan finansial menunjukkan kegagalan.

Karena situasi ini, pemerintah Indonesia berkali-kali melakukan intervensi pasar uang agar nilai

rupiah tidak jatuh drastis, tetapi upaya itu tidak berhasil. Pada 11 Juli 1997 pemerintah Indonesia memperluas rentang intervensi dari 8% menjadi 12%. Tetapi langkah ini nampaknya tidak berhasil karena pada minggu pertama Agustus 1997, nilai rupiah mencapai Rp 2.682 per dollar AS sementara minggu kedua Agustus 1997, nilai rupiah turun menjadi Rp 2.755, atau menurun 25,7%. Keadaan ini memaksa pemerintah Indonesia mencabut rentang (*band*) intervensi rupiah pada tanggal 14 Agustus 1997. Upaya ini pun belum berhasil mencegah semakin jatuhnya nilai tukar rupiah. Memasuki bulan September 1997, penurunan nilai tukar rupiah telah mencapai 39,8%.

Menghadapi realita tersebut pada 16 September 1997 pemerintah menunda proyek-proyek besar senilai Rp 39 triliun. Namun langkah ini belum juga tidak menyelamatkan moneter Indonesia. Nilai tukar rupiah justru terus menurun, sehingga makin mempersulit pembayaran utang luar negeri yang ketika itu mencapai 130 miliar dollar AS (terdiri atas 60% utang swasta dan 40% utang pemerintah). November 1997, nilai rupiah jatuh menjadi Rp 4.000 per dollar. Desember 1997 jatuh lagi menjadi Rp 7.750 per dollar. Januari 1998, rupiah anjlog menjadi Rp 10.000 dan bahkan pernah Rp 17.000 (sehubungan dengan berita sakitnya Soeharto). Februari 1998 rupiah menjadi antara Rp 9.100-9.800. Maret 1998 antara Rp 11.000 dan 8.600. April 1998 antara Rp 7.575 dan 8.600. Mei 1998 antara Rp 7.960 dan 8.100. Juni 1998 antara Rp 11.600 dan 15.000. Juli 1998 antara 14.800

dan 13.225. Pada Oktober 1998 antara Rp 14.800 dan 7.800. Setelah itu nilai rupiah naik turun terus.

Kegagalan di atas tidak lepas dari kondisi internal fundamental ekonomi Indonesia sangat lemah, yaitu adanya kesalahan strategi dalam aplikasi pembangunan nasional. Pertama, pembangunan lebih mengedepankan strategi pertumbuhan. Sejak dicanangkan Pelita I, pemerintah menetapkan strategi pertumbuhan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan industri yang menopang pertanian. Prioritas strategi pertumbuhan mengakibatkan pembangunan, demi efisiensi proses produksi, difokuskan pada sentra wilayah tertentu, yakni wilayah Pulau Jawa dan pusat-pusat kota besar. Hasilnya memang cukup membanggakan, rata-rata pertumbuhan sejak dasawarsa 1980-an mencapai 7%, tetapi secara riil pemerataan timpang, standar hidup penduduk di Pulau Jawa, khususnya di kota-kota besar, jauh lebih tinggi dibandingkan pulau-pulau lain.

Kedua, strategi pembangunan "menganak-emaskan" pengusaha. Dengan mengutamakan pembangunan industri dan target untuk memperbesar ekspor, pemerintah butuh pengusaha sebagai mitranya, padahal pada saat itu posisi peng-

usaha domestik masih dalam keadaan lemah. Sebagai penggerak investasi, pemerintah tidak hanya menyediakan kontrak, proyek serta lisensi sebagai agen tunggal, melainkan juga pemberi kredit besar kepada pengusaha dan pemberi subsidi kepada pelbagai sektor ekonomi. Akibatnya, pengusaha tergantung pada pemerintah di mana pemerintah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai penggerak investasi dan pengalokasian kekayaan negara. Sementara itu untuk meningkatkan ekspor dan perluasan usaha, pemerintah memberi kemudahan dan pinjaman lunak, serta memberi ijin swasta untuk mencari pinjaman luar negeri. Realitanya, kemudahan-kemudahan itu sering disalah gunakan oleh pengusaha misal fasilitas kredit ekspor tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sementara itu pinjaman luar negeri komersial berjangka pendek, oleh pengusaha swasta digunakan untuk proyek-proyek jangka panjang seperti properti. Ketika jatuh tempo, para pengusaha ini kesulitan likuiditas untuk membayar cicilan pokok dan cicilan bunga.

Ketiga, pembangunan terlalu mengandalkan utang luar negeri. Sejak awal kekuasaan pemerintah Orde Baru, rezim Soeharto telah

Tabel : Posisi Utang Luar Negeri RI

Periode	Pinjaman Komersial	Pinjaman Non-komersial		Sub jumlah
		ODA	Non ODA	
1993	2,169	37,818	12,474	52,461
1994	1,727	41,761	15,130	58,618
1995	1,085	43,335	15,169	59,588
1996	1,048	38,888	15,367	55,303
1997	890	38,163	14,812	53,865

Sumber: Statistik Ekonomi-Kuangan Indonesia (Jakarta: Bank Indonesia, Mei 2000).

menetapkan pentingnya penanaman modal asing dan utang luar negeri. Melalui UU No 1/1967 pemerintah membuka lebar-lebar investor asing. Bersamaan dengan itu pemerintah juga mendapatkan utang dari luar negeri, baik secara bilateral maupun multilateral. Asumsinya, pertumbuhan yang cepat pasti memerlukan pinjaman besar terutama dari luar negeri. *Cash-flow* untuk dana pembangunan sangatlah penting (Mohammad, 1998:3). Akibatnya, utang pemerintah terus membengkak. Tercatat pinjaman luar negeri pemerintah dan badan usaha milik negara tahun 1993 berjumlah 52,461 juta dollar AS, meningkat menjadi 58,618 juta pada tahun 1994, dan berturut-turut seterusnya menjadi 59,588 juta, 55,303 juta, 53,865 juta pada 1995, 1996, dan 1997. Tabel di bawah menunjukkan posisi utang luar negeri RI.

Meskipun menunjukkan sedikit penurunan jumlah utang luar negeri pada dua tahun terakhir, tetapi penurunan tersebut tidak sangat signifikan dibanding GDP dengan pembayaran cicilan hutang yang harus dikeluarkan tiap tahun. Ketika rejim Soeharto tumbang ia meninggalkan warisan hutang yang sangat parah. Sampai Juli 1999, jumlah utang luar negeri Indonesia telah mencapai 150 miliar dollar AS, suatu jumlah yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari kelompok pengutang terbesar di antara semua negara pengutang Dunia Ketiga. Jika data Bank Dunia digunakan, di mana hutang per kapita rata-rata 377 dollar AS,

sementara pendapatan per kapita per tahun dalam nilai aktualnya hanya 425 dollar AS, maka Indonesia sebenarnya sudah bisa dimasukkan ke dalam kelompok negara miskin "pengutang berat" di mana rasio pembayaran utang (*debt service ratio*) Indonesia sudah mencapai 54% bahkan sejak 1985 sudah di atas 30% (*Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, 1999: 6).

Keempat, strategi pembangunan didasari sistem otoritarianisme. Untuk melakukan pola bisnis untuk tercapainya strategi pertumbuhan, pemerintah di dalam menggerakkan arus investasi memerlukan sebuah rejim politik yang mampu mengendalikan persaingan pasar dan stabilitas nasional. Demi stabilitas nasional, pemerintah melakukan serangkaian kebijakan mulai dari depolitisasi massa, pengendalian elit politik maupun birokrasi melalui langkah-langkah halus institusional struktural, seperti penetapan undang-undang sampai langkah-langkah destruktif melalui teror politik. Pendekatan keamanan (*security approach*) ini menghasilkan pembangunan ekonomi secara stabil, tetapi sifatnya sangat semu. Kepatuhan dan partisipasi rakyat dalam pembangunan bukan karena kesadaran moral, melainkan karena keterpaksanaan dan ketakutan yang terpendam. Akibatnya, begitu rezim Orde Baru runtuh rakyat berani memberontak. Demonstrasi, pemogokan serta bermunculannya puluhan partai politik baru, merupakan wujud dari ketidakpuasan yang lama terpendam itu.

Dengan berbagai strategi di atas, pembangunan di Indonesia melahirkan dua lapisan atas ekonomi politik utama, yaitu birokrat politik yang melibatkan keluarganya di dalam bisnis, serta pengusaha yang mengembangkan dirinya berkat sokongan pemerintah. Kedua lapisan ini mendominasi perekonomian dan perpolitikan di masa Orba. Buah dari strategi di atas, pembangunan ekonomi secara makro menunjukkan keberhasilan yang cukup gemilang tetapi secara substansial terjadi gelembung ekonomi (*bubble economy*) yang hanya mengena kepada lapisan atas, sementara lapisan bawah, lapisan mayoritas hanya menikmati sebagian kecil dari tetesan kue pembangunan. Fondasi ekonomi yang secara proforma sangat kuat, dengan indikasi besarnya GNP, GDP dan besarnya ekspor, sebenarnya sangat rapuh. Bersamaan dengan itu, praktik otoritarianisme yang sangat membelenggu asas demokrasi telah menyebabkan ketidakpastian massa. Akibatnya, krisis yang semula berawal dari aspek finansial meluas menjadi krisis ekonomi dan politik karena letupan tekanan-tekanan politik yang sejak lama tertindas.

Upaya-upaya Pemulihan

Sebagaimana dijelaskan diatas, krisis ekonomi Indonesia bermula dari krisis finansial. Agar krisis finansial tidak berlanjut, berbagai upaya pemulihan untuk mencegah banyaknya pelarian modal serta menurunnya kepercayaan internasional, dilakukan langkah-langkah antara lain:

1. Bulan Desember 1997 menteri keuangan melakukan *road show* ke luar negeri untuk meyakinkan para kreditur;
2. Untuk mengatasi masalah hutang luar negeri dibentuk Tim Negosiasi Utang Luar Negeri Swasta di bawah pimpinan Radius Prawiro dengan melibatkan berbagai pemimpin Bank bertaraf internasional, seperti Bank of England, Standard Chartered Bank, dan Bank of Switzerland East Asia;
3. Menjamin penuh pada semua depositan dan kreditur dari semua bank umum yang berbadan hukum Indonesia, baik swasta nasional, patungan mau pun pemerintah;
4. Intervensi BI pada pasar valuta asing dan kebijakan suku bunga SBI;
5. Dibentuknya Front Persatuan terdiri Wakil Menteri Keuangan Jepang, Eisuke Sakakigara bersama Menteri Keuangan Singapura, Malaysia, Australia, dan AS guna secepatnya mengambil langkah-langkah kongkrit membantu krisis dan menyelamatkan perekonomian Indonesia.
6. Dibentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK).
7. Dalam rangka restrukturisasi sektor perbankan, dibentuk lembaga baru, yaitu Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN). Langkah ini diambil untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional sehingga bisa menghentikan *rush* sekaligus menarik

- kembali dana-dana yang lari maupun diparkir di luar negeri.
8. Karena kepercayaan masyarakat ekonomi internasional sangat berkurang, pada bulan Oktober 1997 secara resmi meminta bantuan IMF (Djiwandono, 1999: 52). Ide ini didasari pemikiran bahwa India dan Korea Selatan saat mengalami krisis serupa ternyata berhasil berkat bantuan IMF melalui *precautionary arrangement*. Pertengahan September 1997, Stanley Fisher datang ke Indonesia atas undangan Menteri Keuangan, Mar'ie Muhammad, kemudian di dalam diskusinya dengan tim IMF pimpinan Herbert Neiss, Fund Director for the Asia Pacific, dengan Tim Indonesia menyepakati Memorandum on Economic and Financial Policies serta Letter of Intent (31 Oktober 1997), suatu program paket kebijakan reformasi ekonomi untuk menstabilkan nilai tukar dan variabel-variabel moneter lainnya.
- Realisasinya antara lain, selama kurun waktu 1998 pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan ekonomi makro. Realisasinya antara lain pemerintah melakukan serangkaian kebijakan makro berupa reformasi ekonomi seperti beberapa keputusan presiden, peraturan pemerintah, dan instruksi presiden.
- Sesuai dengan rekomendasi IMF, pemerintah melakukan penyesuaian struktural untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Langkah-langkah yang direkomendasi IMF adalah (Ismawan, 1997):
- Mempercepat skenario penurunan secara bertahap tarif bea masuk. Bea masuk untuk produk kimia, besi/baja dan produk-produk perikanan harus diturunkan sehingga menjadi 5-10% pada tahun 2003. Mulai 1 Januari 1998, sebagian besar tarif produk kimia dikurangi dari 10-20% menjadi 5%. Sementara itu sebagian besar tarif besi/baja diturunkan mulai 1 Januari 1999. Penurunan bea masuk produk kimia dan besi/baja memiliki makna strategis dalam konteks penghapusan struktur pasar monopolistik. Hal yang sama tampak pada rekomendasi IMF agar penetapan harga pedoman setempat (HPS) komoditas semen dihapus dalam waktu dekat.
 - Melonggarkan tata niaga berbagai komoditas pokok seperti gandum, tepung terigu, kedelai dan bawang putih. Mulai 1 Januari 1998, barang-barang tersebut dapat diimpor dengan bebas. Impor bawang putih dikenai bea masuk 20%, tepung terigu 10%. Tarif bea masuk itu diturunkan menjadi 5-10% sebelum 2003. Sedangkan untuk melindungi konsumen, pemerintah tetap memberikan subsidi tepung terigu. Apa yang direkomendasi IMF itu *linear* dengan kritikan pengamat domestik mengenai deregulasi yang belum tuntas. Selama ini komoditas pokok memang dianjurkan untuk dilepaskan ke mekanisme pasar, namun pemerintah masih berkeberatan dengan alasan

untuk menjaga stabilitas suplai dan harga.

- c. Mengurangi secara bertahap hambatan-hambatan dan pajak ekspor. Pencapaian pertumbuhan ekspor dari bulan Januari hingga Juli 1997 belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Ekspor hanya tumbuh 9,44%. Akan tetapi ekspor nonmigas lebih baik dibandingkan migas.

Paket reformasi ekonomi pada dasarnya mencakup empat aspek penting, antara lain (a) penyehatan sektor keuangan, (b) pembenahan bidang fiskal; (c) pembenahan bidang moneter; dan (d) penyesuaian-penyesuaian struktural yang mencakup penurunan tarif beberapa sektor industri dan pertanian. Lembaga-lembaga keuangan yang perlu mendapat penyehatan mencakup perbankan swasta, Bank Pemerintah Daerah, bank pemerintah, lembaga pembiayaan, dana pensiun, asuransi, reksa dana, dan perusahaan efek (*Suara Pembaharuan*, 1997).

Program utama adalah paket kebijakan yang berkaitan dengan pembenahan perbankan dan usaha memperkuat infrastruktur finansial serta pembenahan sektor riil dari ekonomi nasional. Yang intinya berupa kebijakan komprehensif untuk memulihkan kembali kepercayaan pasar dan menahan laju kejatuhan rupiah. Program ini berkaitan dengan tiga bidang:

- a. Penguatan kerangka makro ekonomi
- b. Strategi komprehensif untuk restrukturisasi sektor keuangan

termasuk penutupan institusi-institusi bermasalah

- c. Langkah-langkah struktural di segala bidang untuk memperbaiki kinerja pemerintah dan sektor swasta.

Realisasinya tercermin dalam serangkaian kebijakan menteri antara lain:

1. SK Menteri Keuangan No. 15/KMK.017/1998 tentang pencabutan pembatasan pembukaan cabang bank campuran dan cabang pembantu bank asing.
2. SK Menteri Keuangan No. 16/KMK/01/1998 tentang penurunan bea masuk beberapa produk pertanian, menurunkan tarif seluruh produk makanan maksimal lima persen, dengan tujuan agar harga yang terjangkau dan wajar.
3. SK No. 17/KMK/01/1998 tentang penurunan bea masuk atas impor produk tertentu.
4. SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 21/MPP/Kep/1/1998 tentang pembebasan Bu-log dari kewajiban mendistribusikan tepung terigu.
5. SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 48/MPP/1/1998 tentang pencabutan setiap hambatan distribusi semen.

Dalam melakukan programnya IMF tidak bekerja sendiri tetapi bekerja sama dengan World Bank dan ADB. Dalam hal krisis di Asia, IMF telah mengucurkan danannya. Thailand menerima *stand by loan* 4 miliar dollar AS atau 505% dari kuotanya. Korea menerima 21

miliar atau 1.939% dari kuota. Indonesia telah menerima 10 miliar atau 490% dari kuotanya, kemudian pada Juli 1998 mendapat tambahan 1,5 juta yang berarti jumlah keseluruhannya 0% kuota.

Kritik

Selama ini program dan kebijakan pengelolaan krisis dan pemulihan ekonomi dijalankan dengan menggunakan pendekatan dan resep tradisional IMF. Meskipun mendapat kritik dari berbagai pihak, dan IMF sendiri melakukan berbagai macam revisi dan modifikasi, esensi dari pendekatan dan obat IMF masih tetap sama, yaitu memfokuskan segala usaha pada upaya peningkatan kemampuan membayar utang. Untuk tujuan tersebut IMF memprioritaskan pada upaya pengetatan fiskal dan moneter yang terutama ditujukan agar terjadi kontraksi fiskal maupun moneter. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut terdapat beberapa hal positif dan berguna bagi tujuan pemulihan krisis, seperti keharusan menghapuskan segala bentuk distorsi dan perlakuan khusus dalam alokasi sumber daya ekonomi. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang menimbulkan resistensi terhadap implementasi program dan kebijakan pemulihan ekonomi.

Berbagai kasus empirik menunjukkan bahwa paket kebijakan yang dilakukan IMF di negara sedang berkembang, nyaris identik dan bersifat generik. Secara umum IMF memberikan pinjaman untuk

memperbaiki posisi neraca pembayaran. Namun negara yang mendapat bantuan tersebut harus melaksanakan kontraksi fiskal dan moneter agar tersedia surplus untuk menjamin pengembalian utang-utang lama dan baru. Muncul beberapa kritik, *track record* IMF dalam memulihkan krisis di negara-negara berkembang relatif tidak terlalu menggembirakan. IMF tidak banyak berperan dalam mendorong pemulihan ekonomi yang lebih *sustainable* tetapi lebih banyak menciptakan ketergantungan berkelanjutan pada sumber-sumber eksternal. Menurut Martin Khor, resep IMF tidak berjalan baik bagi Asia karena IMF tidak memahami Asia. IMF telah menerapkan kondisi yang tidak tepat bagi Asia karena pengalaman pemulihan krisisnya bercermin pada pengalamannya memulihkan krisis di Amerika Latin dan Afrika, sementara di Asia perekonomiannya ditandai tingkat inflasi dan defisit anggaran yang tinggi serta utang sektor publik. Pengamat ekonomi dari Harvard, Jeffrey Sachs, menyatakan IMF justru memperburuk kondisi perekonomian Asia dengan cara menambah kepanikan yang sudah ada yaitu *panic withdrawal* dana-dana di pasar. Keraguan atas kemampuan IMF dalam memulihkan krisis ekonomi di Asia khususnya Indonesia telah berkembang. Hal ini disebabkan karena ramuan tradisional IMF dianggap terlalu generik, cenderung berorientasi ke Barat dan tidak adaptif terhadap kondisi negara setempat. Menurut Zhen Bingxi, kepala Divisi Ekonomi Dunia pada Institut Studi Internasional di Cina, kebijakan

ketat IMF yang tidak secara spesifik memperhatikan kondisi khusus negara yang bersangkutan, membuat banyak negara lebih menderita akibat tidak tepatnya resep IMF (Kompas, 1998). Berdasarkan pengamatan empirik tersebut, tidak mengherankan bila kinerja perekonomian Indonesia sampai saat ini masih belum menggembirakan.

Krisis Multi Dimensi

Meski ada berbagai kritik, dalam upaya keluar dari krisis ini pemerintah Indonesia mau tidak mau, suka tidak suka tetap harus melakukan kerjasama ekonomi -- "pasien"-- IMF. Sebagai lembaga ekonomi internasional, IMF adalah simbol sekaligus motor penggerak kepercayaan pasar internasional. Masalahnya apakah keterpurukan Indonesia dalam berkubang krisis ini benar karena peran dan resep IMF tidak berhasil? Persoalannya tidaklah demikian. Krisis ekonomi hanyalah pemicu dari letupan berbagai krisis terpendam yang mematangkan kekacauan sosial dan politik secara komprehensif.

Tekanan-tekanan politik selama Orde Baru yang terselimuti stabilitas politik, serta berbagai tekanan sosial selama itu telah menimbulkan ketidakpuasan. Ketika rezim Orde Baru menggalakkan pembangunan nasional, membutuhkan infra struktur - jalan, lahan produksi dan prasana lain - banyak mengena pada tanah "hak milik" atau tanah hak ulayat rakyat. Mereka secara terpaksa "menjual" dan "memberikan" ladang, sawah

atau tanah tersebut dibawah ancaman intimidasi dan tuduhan anti pembangunan. Ketika rezim Orba tumbang, bersamaan dengan tuntutan reformasi menjadi sadar akan haknya. Mereka beramai-ramai menuntut haknya. Sementara lembaga hukum yang diidamkan sebagai pengadilan ternyata bersifat ambivalen bahkan mungkin tidak peduli dengan nasib rakyat kecil. Bersamaan dengan ini kebijakan ekonomi dibawah rezim reformasi Presiden B.J Habibie maupun Presiden Abdurrahman Wahid sesuai anjuran IMF melakukan pembenahan dan efisiensi antara lain likuidasi bank, menutup Departemen Sosial dan Departemen Penerangan telah menimbulkan masalah-masalah sosial baru. Pengangguran meningkat secara drastis terutama wilayah urban di Jawa, yang diperkirakan lebih dari 50 juta penganggur. Sementara itu orang yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat dari 11% menjadi 25% dari seluruh penduduk tahun 1988. Begitu juga *drop out* sekolah, kriminalitas, prostitusi dan masalah sosial lain meningkat. Akibatnya, kekacauan sosial, kekacauan hukum, penghakiman massa, dan kekacauan keamanan berupa kriminalitas dan patologi sosial terjadi dimana-mana.

Tragisnya, kondisi demikian diperparah oleh konflik rasial di berbagai daerah misalnya Atambua dan Sambas, maupun maraknya usaha disintegrasi berbagai wilayah, misal Aceh, dan Irian Jaya. Dan yang lebih tragis lagi ternyata para elit politik yang semula sangat komitmen dengan Panji Reformasi

menuju tatanan Indonesia baru ternyata saling konflik baik pada tataran personal maupun kelembagaan. Sidang DPR membahas Memorandum I (akhir Maret 2001) dan Memorandum II (akhir Mei 2001) tentang tuduhan penyalahgunaan dana Yanatera Bulog dan dana Sumbangan Burnei oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang terus bergulir sampai Sidang Isimewa MPR awal Agustus 2001 merupakan bukti betapa elit politik lebih mengedepankan kepentingan politik daripada pembenahan ekonomi nasional. Kekacauan sosial dan kekacauan politik menafikan upaya perbaikan ekonomi, ibarat menegakkan benang basah.

Lingkaran Setan

Pembangunan nasional akan tercapai dengan baik bila tiga unsur terkait (pelembagaan politik, partisipasi politik, dan stabilitas nasional) berlangsung baik. Stabilitas nasional akan tercipta bila ada pelembagaan politik yakni supra struktur (penguasa) dan hubungannya dengan infrastruktur (rakyat) yang tangguh. Tetapi ini tidak akan tercapai bila tidak disertai partisipasi politik yang utuh, dalam arti rakyat dan elit politik maupun penguasa harus mendasarkan kepentingan dan kesadaran nasional sebagai *frame of reference* mereka, bukan kepentingan dan kesadaran primordialisme seperti ras, agama, atau kepentingan golongan dan pribadi. Selama ketiga unsur ini tidak berlangsung baik, jangan harap perbaikan ekonomi bisa

berhasil. Ibarat suatu lingkaran, pembangunan nasional (pembangunan ekonomi) selalu terkait dan berujung sambung dengan stabilitas nasional, pelembagaan politik, dan partisipasi politik yang harus berjalan secara terpadu. Bila tidak ada harmoni dan keterpaduan maka usaha Indonesia untuk keluar dari krisis ibarat suatu lingkaran setan yang penuh dengan ilusi.

Daftar Pustaka

- Tim Peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, "Tinjauan Paket Bantuan Ekonomi IMF: Studi Tentang Manfaat Bantuan Luar Negeri dalam Rangka Pemulihan Krisis Ekonomi," Laporan Penelitian, 2000.
- World Bank, *Indonesia: Sustaining High Growth with Equity* (Washington D.C.: World Bank, 1997).
- Djiwandono, J Soedradjat, *Jawa Pos*, "Sisi Lain Anjloknya Kurs Rupiah", Tajuk, 5 Desember 1997.
- Mohamad, Dato Seri Dr. Mahathir, "Speech for 'The International Conference on Managing the Financial Crisis: Lessons and Challenges'", 2 November 1998.
- Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, "Pengantar Wacana", No 3, 1999.

Ismawan, Indra, 'Bantuan IMF dan Reformasi Ekonomi', *Media Indonesia*, 3 November 1997.

Suara Pembaruan, 'Krisis Sudah Memasuki Tahap Recovery', 2 November 1997.

Kompas, "Pemulihan Ekonomi Asia Diragukan", 10 Oktober 1998.